



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 686 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

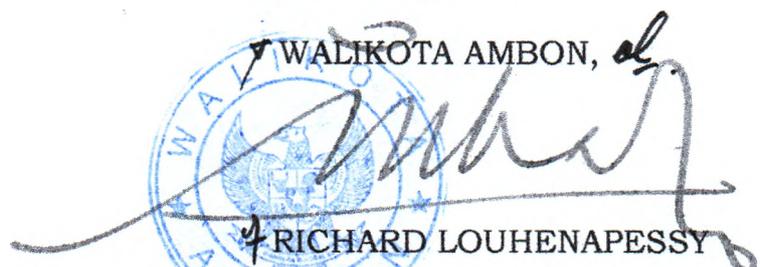
- Menimbang : a. bahwa untuk menyusun Rancangan Produk Hukum Daerah di Lingkup Pemerintah Kota Ambon perlu dilakukan Fasilitasi, Penyerasian, Harmonisasi bersama Organisasi Perangkat Daerah pengusul guna menjadi Keputusan Walikota ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Pembentukan Tim Penyusunan Keputusan Walikota Ambon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645) ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137) ;

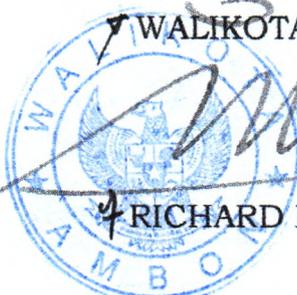
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Kota dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4 Seri D Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 231) ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusunan Keputusan Walikota Ambon, dengan Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana terlampir dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas Melakukan Penyusunan, Penyerasian, Pengharmonisasian dan Mengkaji tentang Usulan Rancangan Keputusan Walikota sebagai Keputusan Walikota Ambon.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim bertanggung jawab kepada Walikota Ambon melalui Ketua Tim.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun 2019 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon.
- KELIMA** : Keputusan Walikota ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 19 September 2019

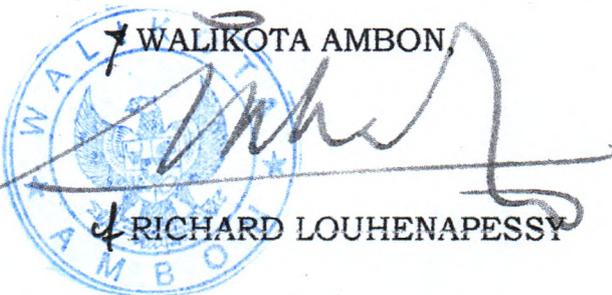
WALIKOTA AMBON, *al*

RICHARD LOUHENAPESSY



Lampiran : KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
 NOMOR : 686 TAHUN 2019
 TANGGAL : 9 September 2019
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM
 PENYUSUNAN KEPUTUSAN
 WALIKOTA AMBON.

SUSUNAN TIM,

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	M. Tupamahu, SH	Asisten Tata Pemerintahan	Pengarah
2.	S. Slarmanat, SH. MH	Kepala Bagian Hukum	Ketua
3.	B. R. Atarwaman, SH	Sub Bagian Perundang- Undangan	Sekretaris
4.	H. M. Far Far, SH. MH	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Maluku	Anggota
5.	Alwiyah. F. Alaydrus, SH, MH	Kabag Perundang- Undangan Setda Provinsi Maluku	Anggota
6.	V. M. Pitries. S. Sos	Sub Bagian Umum dan Dokumentasi Hukum	Anggota
7.	L. M. Manuputty, SH	Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM	Anggota
8.	Rosa. Y. Imoliana, SH	Kasubag Perundang- Undangan Setda Provinsi Maluku	Anggota
9.	S. J. Latuputty	Staf pada Bagian Hukum	Anggota
10.	F. M. I. Polhaupessy, SH	Staf pada Bagian Hukum	Anggota
11.	Ny. A. Uar	Staf pada Bagian Hukum	Anggota
12.	J. Resirwawan	Staf pada Bagian Hukum	Anggota
13.	Taty Rahareng, SH	Staf pada Bagian Hukum	Anggota
14.	S. M. Nussy, SE	Staf pada Bagian Hukum	Anggota
15.	F. L. Tuju, SH	Staf pada Bagian Hukum	Anggota
16.	M. de Fretes, SH	Staf pada Bagian Hukum	Anggota
17.	M. Luhulima, SH	Staf pada Bagian Hukum	Anggota
18.	R. A. Mailoa, S. Kom	Staf pada Bagian Hukum	Anggota
19.	Alexander Da Costa	Staf pada Bagian Hukum	Anggota


 WALIKOTA AMBON
 RICHARD LOUHENAPESY